

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
TUBAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL
HAYAT KABUPATEN TUBAN**

Skripsi

Oleh

Nurul Afifah

C86215025



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Afifah
NIM : C86215025
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Nurul Afifah

NIM. C86215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah Nim C86215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminari munaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Kholiq Syafa'at', written in a cursive style.

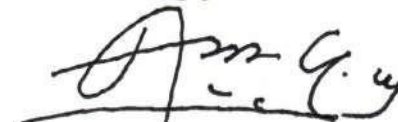
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 19710605200801126

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah NIM. C86215025 initalah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 19710605200801126


Penguji II,


H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,


Kemal Reza, S. Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, S. H. I., M.Ud
NIP.

Surabaya, 9 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.A
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Afifah
NIM : C86215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : afifahnurul673@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TUBAN DAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT KABUPATEN
TUBAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2020

Penulis

(Nurul Afifah)

yang baik-baik, tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami yakni Allah keluarkan dari bumi.

Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakatkan, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.

Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari bumi.

Sekali lagi, pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang baik-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu

analisis dengan hukum Islam dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan skripsi ini lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi di LAZIZ Muhammadiyah Solo yang kemudian ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan zakat profesi di dua lembaga yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Tuban, yang kemudian nantinya dianalisa apakah sesuai dengan Hukum Islam tentang pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi.

3. Tesis Ahmad Taufiqurrahman tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya program studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Syari'ah yang berjudul: "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan). Dalam tesis ini membahas tentang penghimpunan zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, dengan cara memberikan pembekalan dan pembinaan tentang zakat profesi bagi pegawai dan guru yang baru saja masuk di bawah naungan kementerian Agama Kabupaten Magetan, kemudian menawarkan kepada pegawai dan guru dengan memberikan blanko permohonan pengambilan zakat profesi oleh BAZIS Kementerian Agama Kabupaten Magetan, dengan adanya kegiatan ini dilakukan atas persetujuan antara muzaki dan pengurus BAZIS dalam

pengambilan dana zakat profesi.¹⁰ Persamaan tesis ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi, adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan zakat profesi sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat kabupaten Tuban tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi.

4. Skripsi Ahmad Farikhun Ningam tahun 2018, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat Wakaf yang berjudul: “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang penertian zakat dan sosialisasi yang mempunyai dua cara yaitu dengan tatap muka dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial.¹¹ Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi yang mana dalam penelitian terdahulu membahas tentang

¹⁰ Ahmad Taufiqurrahman, “Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan).” (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

¹¹ Ahmad Farikhun Ningam, “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek.” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian zakat profesi yang mencakup tujuan dan fungsi serta pengelolaan zakat profesi menurut hukum Islam. Dalam landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti, sehingga teori ini dapat dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan.

Bab ketiga, perihal data penelitian. bab ini membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, pengelolaan zakat profesi mengenai kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi di kedua lembaga tersebut.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban, tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, penutup. bab ini merupakan bagian yang berisi tentang hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja dan bisa mendorong mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dari sini masyarakat akan terbebas dari penyakit kemiskinan.

Ketiga, menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang-orang mukmin untuk bersifat dermawan dan suka memberi dalam hal kebaikan supaya mereka tidak sebatas memberi pada zakat saja akan tetapi juga yang lainnya.

Keempat, zakat diwajibkan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang dari Allah SWT. Dengan demikian zakat ini dinamakan dengan *zakah mal* (zakat harta kekayaan) zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yaitu karena adanya harta.

Zakat memiliki tujuan yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi, oleh sebab itu tujuan zakat memiliki banyak hikmah bagi seluruh umat muslim, diantaranya:

1. Membantu umat duafa yang membutuhkan dengan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Dapat mensucikan diri dari dosa dan mempunyai rasa murah hati dan menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki
3. Memperkuat tali silaturahmi antara sesama muslim dengan menjadikan umat yang rukun, damai, dan harmonis
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur

tidak ada di zaman Nabi SAW? Ketika itu Rasulullah hanya mencontohkan dengan kurma dan gandum. Sekarang ada zakat fitrah ditunaikan dengan beras karena beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia. Tentunya hal ini juga menggunakan qiyas, yakni menyamakan dengan makanan pokok negeri arab saat itu yaitu kurma dan gandum. Jadi di Indonesia makanan apa saja yang menjadi makanan pokoklah yang dijadikan alat pembayaran zakat. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi Islam mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisab, bersih dari utang dan telah dikurangi untuk kebutuhan pokok pemiliknya. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi mendefinisikan bahwa “maksud dari relatif banyak di atas adalah telah mencapai nisab.

Dengan demikian, penghasilan yang telah mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta para pekerja profesi yang mendapatkan gaji yang relatif banyak wajib dikenakan zakat sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak wajib zakat. Alasan ini dibenarkan karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban berzakat sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati kesamaan dan keadilan. Hal ini sesuai yang dinyatakan Yusuf Qardhawi bahwa “termasuk prinsip keadilan : perbedaan pendapatan pemerataan kesempatan.”

Zakat Kabupaten Tuban Periode 2013-2016, tercatat bahwa selama periode 2013-2016 keorganisasian BAZ Kabupaten Tuban diisi oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban. Ketua langsung dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban, Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Tuban, dan seterusnya. Sementara dalam struktur keorganisasian BAZNAS Kabupaten Tuban, dengan SK Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode 2017-2022, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban diisi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga profesional. Komposisi ini berada di luar ring pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat pada periode ini masih tetap melibatkan Pemerintah Daerah melalui dimasukkannya Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tuban dalam unsur Pelaksana. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga Pemerintah non-struktural harus tetap bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan optimalisasi penerimaan dan usaha membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Spirit undang-undang tentang pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional dan daerah. Buahnya, sejak

tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ terus mengalami peningkatan. Di Kabupaten Tuban, peningkatan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) secara signifikan terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2013 penerimaan ZIS sejumlah Rp. 300.000.000,-. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.300.000.000,-. Pada tahun 2015 penerimaan ZIS meningkat menjadi Rp. 2.804.236.313,-, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 3.849.720.216,-. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp. 6.934.565.990,-. Dan pada tahun 2018 penerimaan ZIS meningkat lagi menjadi Rp. 9.500.000.000,-

Selain penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga terus ditingkatkan bahkan menjangkau sampai ke berbagai pelosok desa yang diwujudkan melalui 5 program, yaitu 1. Tuban peduli, 2. Tuban cerdas, 3. Tuban sehat, 4. Tuban berdaya, 5. Tuban Takwa.

Dalam rangka lebih merapikan dan memaksimalkan pengelolaan zakat maka pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan

dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi di mana BAZNAS, di samping sebagai operator, adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam lampiran Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang bertanggal 5 Juni 2014 tersebut BAZNAS Kabupaten Tuban termaktub pada urutan ke 27 di antara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Bupati Tuban menindaklanjuti terbentuknya kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut dengan membentuk Tim untuk menyeleksi calon-calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban. Setelah memperoleh pertimbangan BAZNAS melalui surat nomor 082/DPRDN/BAZNAS/III/2017, tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H/23 Maret 2017 M, Bupati Tuban mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tanggal 21 April 2017 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode Tahun 2017-2022.

BAZNAS Kabupaten Tuban yang kini berkantor di Jl. Pramuka RT01/RW01, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, telah mengalami

		zakat entitas pada bank jatim zakat	
2	Februari	1) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat perorangan bank jatim zakat	Rp. 192.495.222 Rp. 34.995.404
3	Maret	1) Penerimaan zakat perorangan bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 3) Penerimaan zakat entitas bank jatim zakat	Rp. 26.589.479 Rp. 204.368.463 Rp. 30.725.110
4	April	1) Penerimaan zakat perorangan bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 3) Penerimaan zakat entitas bank jatim zakat	Rp. 25.059.475 Rp. 201.279.452 Rp. 15.112.555
5	Mei	1) Penerimaan dana zaat via UPZ kemenag kabupaten tuban bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat perorangan bank jatim zakat 3) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat	Rp. 118.200.000 Rp. 62.232.729 Rp. 149.972.164
Jumlah Total			Rp. 3.196.209.109

B. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Kabupaten Tuban

1. Profil LAZNAS Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, yang berpusat di Surabaya beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Kemudian mempunyai kantor perwakilan atau cabang di antaranya: kota Sidoarjo, Malang, Kediri, Tuban, Gresik, Bojonegoro, Madiun, Yogyakarta dan masih banyak lagi, dan Tuban termasuk salah satu cabang Yayasan Nurul Hayat. Lembaga ini bergerak dalam bidang layanan sosial, dakwah pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan :

- a. Akta Notarsi Ariyani S.H. Notaris Surabaya nomor : 9-IX-2001.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: C-3242. HT. 01.02.TH 2007.
- c. Surat Keterangan Tedaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009.
- d. Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/1539/436.15/2009. dan telah diperbaharui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013.
- e. Surat BAZNAS nomor 4 tahun 2015 tentang Rekomendasi Yayasan Nurul Hayat menjadi Lembaga Amil Zakat berskala Nasional.
- f. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional.

tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Adanya intervensi pemerintah dan ulama, kaitannya dengan pembayaran zakat profesi, menandakan bahwa masih ada komitmen tinggi pada diri seorang pemimpin, yang mendukung pembayaran zakat tersebut. Hal ini memang tidak mudah dilakukan dan memerlukan personifikasi sikap dan perilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan pegawai dan penjabat. Sehingga pembayaran zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama di kota Tuban dapat dipertahankan.

Lembaga BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dalam mengerahkan dan menghimpun dana zakat selalu proaktif menggali dari berbagai sumber yang halal. Maka untuk mendapatkan perolehan dana yang optimum dengan membangun sistem penghimpunan data dan penggalangan dana yang efektif dan efisien dari para muzaki melalui berbagai langkah kebijakan yang strategis, baik dengan perorangan (individu), perusahaan

program semacam ini akan mentransfer mustahiq menjadi muzaki. Oleh karena itu, perlu adanya sinergisitas dalam penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan mampu dioptimalkan sebaik oleh para mustahiq maupun masyarakat yang membutuhkan.

Dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan, disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan (syariah). Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut :

1. Jenis-jenis zakat
2. Dana zakat
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzaki)
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik)
5. Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat)
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat (profesi)

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dan selaras dengan hikmah yang dikandung dalam ajaran zakat, maka pengelolaan zakat perlu ditangani

secara professional oleh lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya seperti BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat. Dengan adanya kedua lembaga ini manfaat zakat secara pengelolaanya akan lebih mudah diterima dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa yang berhak menerima dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mereka memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi.

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar karena masih banyak masyarakat umum belum banyak mengetahui lembaga pengumpulan zakat baik dari pemerintah maupun pengelola swasta. Untuk menangkap dan mengejar “*bola zakat*” perlu adanya sosialisasi yang masif dan kontinue untuk menyerap dana zakat dari perorangan (individu) maupun perusahaan yang ada di kota Tuban, untuk itu lembaga-lembaga yang berwenang menyiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat agar memudahkan muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya. Bahkan BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat menerbitkan website yang bisa diakses dengan mudah dan brosur yang menampilkan jenis dan perhitungan zakat (profesi) di dalamnya, sehingga kedua lembaga tersebut selalu terbuka untuk menerima dana zakat dari para wajib zakat (muzaki).

Adapun tabel perhitungan nisab zakat dari BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat adalah sebagai berikut:

A.1 Tabel Perhitungan Nişab Zakat Profesi dari BAZNAS dan LAZNAS

Nurul Hayat

BASNAZ Tuban	Zakat Profesi / Penghasilan	524 Kg/ 640 L Beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ Kg x 524 Kg : Rp. 5.240.000,-	Saat Diperoleh	2,5 %
LASNAZ Nurul Hayat	Zakat Profesi/Penghasilan	653 kg gabah kering / 522 kg beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ kg x 522 = 5.220.000,-	Saat menerima	2,5 %

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan, lagi pula zakat tidak begitu sulit untuk dikumpulkan karena muzakki lebih sadar dan suka untuk menyetor zakat daripada menunggu untuk diambil dana zakatnya. Sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

BAZNAS Tuban dalam pengumpulan zakat profesi lebih bersifat tersistem yang mana dalam pengumpulannya sesuai dengan intruksi Bupati yang mengharuskan setiap PNS dari golongan 3 (sebagian) dan 4 (semuanya) yang mana bendahara gaji setiap bulan memotong gaji pegawai tersebut, kemudian zakatnya disalurkan ke BAZNAS Tuban, dan beberapa perusahaan seperti Pabrik Semen Indonesia yang berada di Tuban, TPPI (*Trans Pasific*

implementasi zakat profesi kiranya perlu dikembangkan secara sistematis dan terstruktur agar kesejahteraan hajat hidup manusia lebih baik dengan pemanfaatan zakat profesi secara optimal.

Manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, dengan mengoptimalkan peran badan atau lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat guna mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, dan diniati untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. BAZ maupun LAZ harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima dan tempat pendistribusiannya agar terbangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Mengimplemetasikan zakat profesi langkah selanjutnya adalah harus membuat skala prioritas, terkait dengan pendayagunaan zakat mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan umum. Disini perlu ada kinerja yang tepat guna untuk mengelola dana zakat (profesi), bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan umum dengan sekian banyak skala prioritas, BAZNAS Tuban dan Laznas Nurul Hayat tampaknya telah memiliki program-program

Istilah bekerja dengan menggunakan kata “amal” dalam Al-Quran, bukan saja dipakai dalam beramal atau bekerja untuk kehidupan akhirat, tapi digunakan juga untuk bekerja bagi kehidupan dunia, oleh karena itu, seseorang harus mempunyai kapasitas dan kemampuan sesuai bidang agar profesionalitasnya terjaga dan mampu bekerja mengemban amanah khususnya untuk mengelola zakat.

BAZNAS Tuban untuk pengelola zakat (amil zakat) ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017. Bahwa pemimpin BAZNAS diisi oleh tokoh agama, masyarakat dan tenaga profesional. Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat pengelola zakat (amil zakat) dalam melaksanakan tugasnya dengan memegang teguh 4 komitmen, yaitu: mandiri, amanah, profesional dan memberdayakan. Jadi pengelola zakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat telah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan benar, kemudian didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Karena banyaknya muzakki dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kesejahteraan umat.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat juga diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

pasti diambil dari pendapatan bersih atau gaji bersih. Hal itu dimaksudkan agar muzakki dapat menunaikan kewajibannya jika ia mempunyai hutang atau dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. berdasarkan hal itu, maka sisa gaji atau pendapatan setahun terkena wajib zakat bila mencapai nişab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nişab uang tidak terkena wajib zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan kepincangan sosial yang terjadi dimasyarakat dimana masih banyak ditemukan disekitar lingkungan kita. Banyaknya golongan masyarakat fakir dan miskin dapat diberikan dorongan, dengan menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan terutama dengan pendistribusian zakat profesi dengan mengoptimalkan program kerja yang telah direncanakan, agar kedepanya jaminan sosial mereka terjamin dan merasakan hidup yang lebih layak.

Penyaluran dana zakat tidak ditempuh begitu saja, BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat lebih dahulu membagi delapan asnaf mustahiq menjadi beberapa kelompok, begitu juga dana zakat yang akan disalurkan

ditetapkan berdasarkan alokasi dana bagi setiap kelompok. Dalam penyaluran dana ini, mereka sudah menetapkan sasaran-sasaran mustahiq dan bentuk program pendayagunaan. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzakki dan mustahiq. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas obyektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan atau pertolongan dari dana zakat. Fungsi perencanaan dan penyaluran dapat mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan kaum dhuafa dengan implikasinya yang dituangkan dalam rencana tahunan jangka pendek dan rencana lembaga jangka panjang untuk memudahkan pemetaan terhadap para mustahiq yang membutuhkan dana tersebut. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Program pemberdayaan yang berupa pendayagunaan yang telah dilakukan kedua lembaga tersebut selama ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam kontemporer salah satunya yaitu Yusuf Qardawi, bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan. Semua

sepakat bahwa zakat menduduki posisi strategis untuk mengatasi masalah ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan menggerakkan roda ekonomi (investasi) yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam dimasa mendatang dengan mengelola dan mendayagunakan dana zakat sebaik-baiknya.

C. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dari Segi Tinjauan Hukum Islam

Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakāh rawātib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakāh kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi ini diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian khusus, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga yang kemudian mendatangkan penghasilan dan telah memenuhi nisab.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada masa sekarang, yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di antara pendapat ulama karena penerapan zakat profesi atau penghasilan tidak di dasarkan pada dalil al-Qur'an dan Hadis, melainkan berdasarkan pada qiyas. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa ada beberapa alasan keharusan adanya zakat profesi, yang mana profesi tersebut menghasilkan uang yang relatif banyak.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan

suatu keahliannya, kecerdasannya atau keterampilannya seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya, atau dari pekerjaan yang melalui lembaga seperti pegawai negeri atau swasta. Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.⁶⁵

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, niscaya zakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Seperti program dari BAZNAS Tuban yang memprioritaskan untuk meringankan beban dan membahagiakan warga fakir, miskin, dan yatim piatu di Tuban, sedangkan LAZNAS Nurul Hayat dengan programnya yaitu pemberdayaan ekonomi duaifha mampu menjawab bagaimana menyalurkan dana zakat dengan efektif dan efisien. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum fakir dan miskin secara berangsur-angsur akan berkurang.

⁶⁵ Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal.52.

5. Program pembebasan budak
6. Orang-orang yang tengah terlilit hutang (*garim*)
7. Program pembangunan agama (*fisabilillah*)
8. Orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnu sabil*)

Adapun dari delapan asnaf itu di Indonesia tinggal tujuh asnaf saja karena asnaf riqab yang dalam arti memerdekakan budak di Indonesia tidak ada (karena Indonesia tidak ada budak). Para ulama mengkategorikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang kurang berhak antara lain: orang fakir dan miskin yang lemah, orang fakir yang miskin yang tidak pernah meminta-minta, orang-orang yang tekun menuntut ilmu. Sedangkan mereka yang kurang berhak antara lain: orang yang kuat dan masih mampu, orang yang hanya beribadah dan sangat jarang bermuamalah. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah membuat skala prioritas mana saja yang perlu didahulukan di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan yang sangat membutuhkan dan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk makan, dan untuk mustahiq yang tidak mempunyai pekerjaan.

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup nisab dan sudah memenuhi haul. Menurut jumbuh ulama, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang

mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang, kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi satu haul antara lain emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib zakat dizakati tanpa menunggu jangka waktu tertentu seperti zakat hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkan zakatnya. Dan perkembangan modern saat ini dalam pengelolaan zakat tidak menutup kemungkinan zakat penghasilan dari gaji (profesi) sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa dari pekerjaan tersebut harus mengeluarkan zakat dari hasil pekerjaan mereka yaitu seperti profesi dokter, pengacara, insinyur yang mendapat penghasilan yang cukup besar dan cukup untuk mengeluarkan zakat.

Zakat Profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan dimasyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional, misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, dan insinyur yang hanya dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.

Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara professional di Kota Tuban, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual (muzaki dari kalangan orang yang mampu) maupun lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat mereka. melalui program pemberdayaan ekonomi duafa, aksi tanggap bencana dan senyum hari raya secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial dan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, LAZNAS Nurul Hayat mendayagunakan hasil pengelolaan zakat profesi secara tepat sasaran dan akuntabel yang mana memberikan dampak yang positif untuk kalangan umat Islam khususnya di Wilayah Tuban.

3. Sistem pengelolaan zakat pofesi di BASNAZ kabupaten Tuban dan LASNAZ Nurul Hayat Tuban termasuk di dalamnya cara-cara pengelolaan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat mengacu pada dasar hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an, meskipun tidak secara spesifik dijelaskan mengenai zakat profesi. Dalam melakukan pengelolaan dan pendayagunaan hasil penerimaan zakat BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat melakukannya secara professional dan akuntabel agar mendapat kepercayaan dari masyarakat baik secara individual maupun kelompok, karena di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat serta cara

- Qamari, Muhammad Wakhid, Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana. *Wawancara*. Kantor BAZNAS Tuban, 17 Desember 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- Rizky, Muhammad. “*Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan zakat Profesi di LAZIZWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Shihab, M. Quraish. “*Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur’an, volume 1& 5*”. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2016.
- Suryorini, Ariana. “*Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 32, No. 1. Januari-Juni 2012.
- Subagyo, Jogo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Tim Emir. *Panduan Zakat terlengkap*. Erlangga : Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Taufiqurrahman, Ahmad. “*Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan)*.” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- www.baznas.tubankab.go.id.
- www.nurulhayat.org.
- Yusuf, Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.